

STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN
ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

RATNA KURNIA SARI
NPM. 0971010102

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN
ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010

Disusun oleh:

RATNA KURNIA SARI

NPM: 0971010102

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., MM.

NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010

Disusun oleh:

RATNA KURNIA SARI
NPM: 0971010102

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 20 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji:

1.

Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Fauzul Aliwarman, S.Hi., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

3.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010

Disusun oleh:

RATNA KURNIA SARI
NPM: 0971010102

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 20 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji:

2.

Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Fauzul Aliwarman, S.Hi., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

4.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Kurnia Sari
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 7 Maret 1990
NPM : 0971010102
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Kendangsari Gg IV/51 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing

Surabaya, 24 Juni 2013
Penulis,

(Sutrisno, S.H., M. Hum.)
NIP. 19601212 198803 1 001

Ratna Kurnia Sari
NPM. 0971010102

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Studi Komparasi Pengakuan Anak Luar Kawin Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”

Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu, Penulisan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarannya kepada penulis selama melaksanakan Penulisan skripsi. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dengan

penyuh kesabaran dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Drs.Ec. Gendut Soekarno, MS selaku Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo beserta seluruh anggota yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan segala bentuk upaya bantuan berupa pemberian data-data yang penulis butuhkan.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya beserta seluruh anggota yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan segala bentuk upaya bantuan berupa pemberian data-data yang penulis butuhkan.
7. Seluruh Tim penguji ujian lisan skripsi yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kemad dan Ibu Sumarni yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.

11. Tak lupa kepada teman-teman yang banyak memberikan dukungan, Imas, Umik (Mbak Retno), Edo, Budi, Tomi dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya bisa membangun, penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan Penulisan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan..

Surabaya, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.5.1 Kajian Umum Anak Luar Kawin	7
1.5.1.1 Pengertian Anak	7
1.5.1.2 Hak-hak anak menurut UU Perlindungan Anak....	8
1.5.1.3 Pengertian Anak Luar Kawin	11
1.5.1.4 Anak Luar Kawin Menurut Konsep KUHPerdara	12

1.5.1.5 Anak Luar Kawin Menurut Konsep UU Perkawinan	17
1.5.1.6 Latar Belakang Timbulnya Anak Luar Kawin	18
1.5.2 Kajian Umum Pengakuan.....	19
1.5.2.1 Pengertian Pengakuan.....	19
1.5.2.2 Jenis Pengakuan	20
1.5.3 Kajian Umum Mahkamah Konstitusi.....	21
1.5.3.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi	21
1.5.3.2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	22
1.5.3.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	22
1.5.3.4 Kewajiban Mahkamah Konstitusi.....	23
1.5.3.5 Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional MK.....	23
1.6 Metodologi Penelitian	26
1.6.1 Jenis Penelitian.....	26
1.6.2 Sumber Data.....	27
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	29
1.6.4 Metode Analisis Data	31
1.6.5 Lokasi Penelitian	31
1.6.6 Sistematika Penelitian	32

BAB II KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIATUR DALAM KUHPERDATA DENGAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010

2.1 Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdata.....	34
---	----

2.2 Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	39
2.3 Analisis Perbandingan Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Antara KUHPerdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	44
BAB III DAMPAK PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN	
3.1 Status Hukum Anak Luar Kawin	49
3.2 Hak Pemeliharaan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya.....	56
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kartu bimbingan skripsi
- Lampiran 2. Surat keterangan penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 3. Daftar pertanyaan di Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 4. Surat izin melakukan penelitian di Dispenduk Capil Kota Surabaya
- Lampiran 5. Daftar pertanyaan di Dispenduk Capil Kota Surabaya
- Lampiran 6. Contoh surat pernyataan pengakuan anak
- Lampiran 7. Contoh formulir pengakuan anak
- Lampiran 8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Ratna Kurnia Sari
NPM : 0971010102
Tempat Tanggal Lahir: Ngawi, 7 Maret 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam KUHPdata dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Menurut KUHPdata, Pengakuan anak luar kawin harus dilakukan oleh bapak atau ibunya untuk mendapatkan hubungan keperdataan. Pengakuan anak luar kawin hanya diperbolehkan terhadap anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang, Sedangkan, menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 seorang anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak luar kawin yang dimaksud disini lebih luas, yaitu meliputi semua jenis anak luar kawin termasuk juga anak zina dan anak sumbang. Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, status anak luar kawin tetap menjadi anak luar kawin meskipun memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya. Dan sebagai akibat adanya hubungan keperdataan antara ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya, maka timbulah hak dan kewajiban alimentasi diantara keduanya yang berlaku secara timbal balik.

Kata kunci: Pengakuan, anak luar kawin, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT dalam suatu ikatan perkawinan, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Namun, kenyataan yang ada tidaklah demikian banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib keluarganya, karena kelahiran anak tersebut berasal dari hubungan luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama, etika maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir di dunia.¹

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah

¹ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, h. 4

membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.²

Hal tersebut senada dengan KUHPerdara, dalam Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya” dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUHPerdara adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapat si suami sebagai ayahnya dan pengertian sebaliknya dari rumusan Pasal di atas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Akan tetapi dalam KUHPerdara membedakan anak luar kawin menjadi 3 kelompok antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Dalam KUHPerdara seorang anak luar kawin baru akan mendapat hubungan keperdataan dengan bapak maupun ibunya apabila telah mendapat pengakuan dari ayah maupun ibunya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Sedangkan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengertian sebaliknya dari Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi anak luar kawin atau anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

² Ibid, h. 46

Sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dalam hal ini kedudukan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pasal tersebut dirasa oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah merugikan hak konstitusionalnya. Menurut penjelasan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mengajukan uji

materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” yang menurut para pemohon bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 juga menimbulkan berbagai kontroversi, khususnya mengenai status anak luar kawin. Dan secara tidak langsung putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam KUHPdata (BW) Pasal 280-289.

Indonesia adalah salah satu Negara bekas jajahan Belanda, maka berdasarkan pada asas konkordasi / asas keselarasan, yakni asas keselarasan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 131 (2) Indische Staatsregeling (IS) yang berbunyi “Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) Undang-Undang di negeri Belanda”. Maka di Indonesia berlakulah KUHPerdato (BW) yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan UUD 1945 maka BW tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasar atas UUD ini.

Pengakuan anak luar kawin ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan KUHPerdato memiliki beberapa perbedaan-perbedaan. Disamping perbedaan-perbedaan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan KUHPerdato memiliki beberapa persamaan-persamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah komparasi pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Apa dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang status dan kedudukannya sebagai anak luar kawin?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Untuk mengetahui komparasi atau perbandingan mengenai pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui dampak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang status dan kedudukannya sebagai anak luar kawin.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam pengakuan anak luar kawin
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang selama ini belum ada.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Kajian Umum Anak Luar Kawin

1.5.1.1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. dari segi lain kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau Anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.³

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

³Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 78

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁴

1.5.1.2.Hak-Hak Anak Menurut Pasal 4-18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berikut adalah hak-hak anak menurut Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

⁴ D.Y. Witanto, op.cit., h. 6

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari: penyalagunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

1.5.1.3. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁵

Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁶

1.5.1.4. Anak Luar Kawin Menurut Konsep KUHPerdato

KUHPerdato mengenal tiga macam anak, yaitu:

- a. Anak sah;
- b. Anak luar kawin yang diakui;
- c. Anak luar kawin yang tidak diakui.⁷

Anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdato menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya” dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUHPerdato adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapat si suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya

⁵ Ibid, h. 46

⁶ Abdul Manan, Op.cit., h. 80

⁷ Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, cetakan kedua, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h. 97

dari rumusan Pasal di atas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah.⁸

Kemudian dalam Pasal 251 KUHPdata menyebutkan bahwa “keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami istri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri;
- b. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itupun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya;
- c. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masa kehamilan (zwangerschapsperiode) yang dianggap paling pendek, yaitu 180 hari, sedangkan Pasal 255 ayat 1 BW menyatakan bahwa anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan dibubarkan, adalah tidak sah.⁹

Apabila seorang istri melahirkan anak sebelum 180 hari terhitung sejak hari perkawinan, seorang suami diberi hak untuk menyangkal bahwa ia adalah ayah dari anak itu. Hak tersebut tidak diberikan kepada suami apabila sebelum

⁸ D.Y. Witanto, Op.cit., h. 108

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, cetakan III, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 166

perkawinan ia mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan hamil.

Di samping itu, apabila si suami telah mengetahui secara pasti bahwa ia bukanlah ayah dari anak yang dikandung si istri dikarenakan tidak pernah berhubungan dengan si istri sebelum perkawinan. Dalam hal yang demikian berarti si suami mengawini istrinya untuk mengakui anak orang lain. Perbuatan suami yang dimaksud dalam pasal 251 sub (2) dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam bahwa suami adalah ayah si anak, sehingga dikemudian hari ia tidak berhak lagi untuk menyangkalnya.¹⁰

Suami tidak dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, kecuali dalam empat hal, yaitu:

- a. Jika anak dilahirkan sebelum hari ke-180, terhitung sejak hari dilangsungkannya perkawinan;
- b. Jika suami sejak hari ke-300 sampai 180 hari sebelum lahirnya anak, baik karena pisah, maupun sebagai akibat suatu kebetulan, sehingga berada dalam ketidakmungkinan untuk bersetubuh dengan istrinya secara nyata (Pasal 252 BW);

¹⁰ Ibid, h. 167

- c. Jika istri berbuat overspel dan menyembunyikan kelahiran anak tersebut terhadap suaminya (Pasal 253 BW);
- d. Jika anak dilahirkan 300 hari setelah hari putusan pisah meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan tetap (Pasal 254 BW).¹¹

KUHPerdata membagi anak luar kawin menjadi 3 kelompok antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui.¹² Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. Anak sumbang (incest) atau sering juga disebut anak hasil penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melaksanakan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum islam) dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak dalam golongan ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.

¹¹ Ibid, h. 166

¹² Ibid, h. 109

Seorang anak luar kawin baru akan mendapat hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya apabila telah mendapat pengakuan dari ayah maupun ibunya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Dalam KUHPerdara diatur secara rinci dan tegas adanya empat macam kedudukan anak sebagai berikut:

- a. Anak sah, yaitu anak yang dianggap lahir selama perkawinan orang tuannya (Pasal 250 KUHPerdara);
- b. Anak wajar, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan orang tuannya. Istilah anak wajar dipakai dalam dua pengertian:
 1. anak wajar dalam arti luas, yakni semua semua anak luar kawin yang tidak disahkan;
 2. anak wajar dalam arti sempit, yakni terbatas pada anak luar kawin yang diperoleh dari zina dan incest;
- c. anak zina, yaitu anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, yang salah satu atau kedua orang tuanya telah mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Anak yang lahir karena hubungan zina (anak zina) ini dilarang untuk diakui dan disahkan (Pasal 272 KUHPerdara)

d. anak incest (anak sumbang), anak yang lahir dari kedua orang tua yang oleh Undang-Undang dilarang kawin.¹³

1.5.1.5. Anak Luar Kawin Menurut Konsep UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal di atas akan menimbulkan anak tidak sah atau anak luar kawin.

Anak tidak sah atau anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut dapat kita temukan dari makna yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Komariah, Hukum Perdata, Cetakan keempat, UMM Press, Malang, 2010, h. 63

1.5.1.6.Latar Belakang Timbulnya Anak Luar Kawin

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:

- d. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- e. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- h. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga

kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.

- i. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan. Misalnya: Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu diantara mereka telah mempunyai istri tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut. Anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
- j. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- k. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- l. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.¹⁴

1.5.2. Kajian Umum Pengakuan

1.5.2.1. Pengertian Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan

¹⁴ Ibid, hal. 146

oleh undang-undang bahwa ia adalah ayah (ibu) dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan.¹⁵

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Sedangkan menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi dan membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut.¹⁶

1.5.2.2. Jenis Pengakuan Anak

Undang-undang mengenal dua jenis pengakuan anak, yaitu:

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, Op.cit., h. 181

¹⁶ Abdul Manan, Op.cit., h. 84

a. Pengakuan dengan sukarela

Dengan pengakuan tersebut, maka timbul hubungan perdata antara anak dengan ayah (ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280 BW).

b. Pengakuan dengan paksaan

Pengakuan dengan paksaan yang dimaksud disini adalah keputusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seorang anak luar kawin. Jadi, keputusan yang demikian tidak mungkin diperuntukkan bagi anak-anak zina dan sumbang.¹⁷

1.5.3. Kajian Umum Mahkamah Konstitusi

1.5.3.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung.¹⁸

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, Loc.cit.,

¹⁸ http://id.m.wikipedia.org/wiki/mahkamah_konstitusi_Indonesia diakses tanggal 18 februari 2013, pukul 12:37 wib

Mahkamah Konstitusi RI (disingkat MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, selain Mahkamah Agung (disingkat MA) dengan seluruh badan peradilan yang bernaung dibawahnya.¹⁹

1.5.3.2.Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan MK adalah:

- a. merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman;
- b. merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan
- c. sebagai penegak hukum dan keadilan.²⁰

1.5.3.3.Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK memiliki kewenangan :

- a. menguji UU terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

¹⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, cetakan I, Konstitusi press, Jakarta, 2006, h. 127

²⁰ Ibid, h. 119

- e. memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.5.3.4. Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - 1) Penghianatan terhadap Negara
 - 2) Korupsi
 - 3) Penyuapan
 - 4) Tindak pidana lainnya.
- b. Atau perbuatan tercela, dan/atau
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

1.5.3.5. Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional MK

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
 - 1) Subyek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah: i) perorangan WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; ii) kesatuan masyarakat

²¹<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.profilMK&id=3> diakses tanggal 18 Februari 2013, pukul 12:37 wib

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang; iii) badan hukum publik atau privat; atau iv) lembaga Negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

2) Obyek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang meliputi pengujian secara formil, yaitu pengujian mengenai apakah pembentuk dan bentuk undang-undang sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, dan pengujian secara materiil, yaitu pengujian mengenai apakah materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara

1) Pemohonnya adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan termohonnya adalah lembaga Negara yang mengambil kewenangan lembaga Negara lainnya.

2) Obyek sengketa adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945

c. Memutus pembubaran partai politik

- 1) Pemohonnya adalah pemerintah, sedangkan termohonnya adalah partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan
 - 2) Alasan pembubaran adalah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- d. Perselisihan hasil pemilihan umum
- 1) Pemohonnya adalah perorangan peserta pemilu, DPD, partai politik peserta pemilu dan pasangan Capres atau Cawapres peserta pemilu presiden dan wakil presiden, sedangkan termohonnya adalah KPU
 - 2) Obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu oleh KPU
- e. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 1) Pemohon adalah DPR yang disetujui oleh minimal 2/3 dari minimal 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna
 - 2) Alasannya adalah: i) Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum karena penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela, dan ii)

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan UUD 1945.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu (a) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis dan (b) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik. Penelitian hukum yang disebutkan terakhir itu terdiri atas normatif atau doktriner dan empiris.²² Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Studi Komparasi Pengakuan Anak Luar Kawin antara KUHPPerdata dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010”, yang bertujuan untuk menemukan persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan kedua sumber hukum tersebut. Maka, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 22

normatif. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menganalisis kedua sumber hukum tersebut disertai wawancara dengan pihak terkait.

1.6.2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tertier. Adapun maksud dari ketiga bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat berupa peraturan perundang-undang. Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang,
- 2) Peraturan Pemerintah,
- 3) Peraturan Menteri dan sebagainya.

Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan
dan Pencatatan Sipil
- 11) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.²³

Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari literatur-literatur hukum, internet, serta semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan KUHPdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁴

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.²⁵

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini,

²³Ibid. hal 23

²⁴Ibid, hal 24

²⁵<http://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/> diakses tanggal 16 februari 2013 pukul 14:22 wib

penulis menggunakan studi kepustakaan. Penulis mempelajari serta memahami berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang dikomparasikan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mencari dan mengumpulkan literature-literatur lain yang dapat menunjang hasil penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara (bahasa inggris : interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.²⁶

Pengumpulan data juga dilakukan oleh penulis melalui proses wawancara yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan pengakuan anak luar kawin, Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai tempat pengajuan gugatan sebagai akibat dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan kepada narasumber lainnya yang mengerti tentang hukum keluarga, khususnya mengenai pengakuan anak luar kawin.

²⁶ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara> diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 14:38 wib

1.6.4. Metode Analisis Data

Pada hakekatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau temuan yang ingin dijawab.²⁷

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deduktif, yakni bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁸

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis memilih lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai lokasi penelitian, karena di lokasi tersebut data-data dan bahan permasalahan yang dibutuhkan mudah diperoleh.

²⁷<http://www.menulisproposalpenelitian.com/2012/01/beberapa-model-analisis-data-dalam.html?m=1> diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 15:09wib

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan XIII, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 11

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang berisi pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai komparasi pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam KUHPdata dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang dijabarkan dalam tiga sub bab, antara lain sub bab pertama yaitu pengakuan anak luar kawin menurut KUHPdata, sub bab kedua yaitu pengakuan anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan sub bab ketiga yaitu Analisis perbandingan tentang

pengakuan anak luar kawin antara KUHPdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Bab ketiga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengakuan anak luar kawin. Pada bab ketiga ini akan dijabarkan dalam dua sub bab. Sub bab pertama yaitu mengenai status hukum anak luar kawin, sub bab kedua yaitu mengenai hak pemeliharaan anak luar kawin oleh ayah biologisnya.

Bab keempat merupakan bab penutup. Bab penutup ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran atas pokok permasalahan tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.